

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Faktor demokrasi selama tahun 2010 – 2017 memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD perkapita provinsi di Indonesia sebesar 0,028641 artinya setiap peningkatan seratus persen bobot IDI, maka PAD per kapita akan meningkat sebesar Rp. 2,8641. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
2. Faktor politik memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap PAD perkapita provinsi di Indonesia periode 2010-2017 dengan koefisien sebesar 4,58E-09 artinya setiap peningkatan satu milyar partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif, maka PAD per kapita akan meningkat sebesar Rp. 4,58. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
3. Korupsi memiliki hubungan negatif terhadap PAD perkapita provinsi di Indonesia periode 2010-2017 sebesar 0,000241 artinya setiap peningkatan sepuluh ribu kasus korupsi, maka PAD per kapita akan menurun sebesar Rp.2,41. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
4. Tata kelola pemerintah memiliki hubungan positif terhadap PAD perkapita provinsi di Indonesia periode 2010-2017 sebesar 0,303252 artinya setiap peningkatan sepuluh persen bobot tata kelola pemerintah, maka PAD per kapita akan meningkat sebesar Rp. 3,03252. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
5. Tata kelola pemerintahan merupakan variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi PAD dengan koefisien terbesar dibandingkan demokrasi, politik dan korupsi.
6. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan dan bersama-sama faktor non ekonomi (demokrasi, politik, korupsi dan tata kelola pemerintahan) memberikan kontribusi menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,97%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti dan tidak dimasukkan dalam model penelitian ini menjelaskan PAD.
7. PAD dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dan faktor ekonomi secara bersama-sama dengan arah yang positif dan signifikan, dengan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 48,29%, sehingga faktor non ekonomi menjadi predeterminan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Konsekuensi demokrasi adalah tercapainya *good governance* yang akuntabel dan transparan melalui pelaksanaan desentralisasi yang didukung dengan

- administrasi serta tata kelola pemerintahan. Diharapkan dengan *good governance*, korupsi akan menurun dan bahkan tidak mustahil hilang di seluruh provinsi di Indonesia.
8. Derajat desentralisasi fiskal tidak selalu berbanding lurus dengan PAD perkapita artinya pertumbuhan PAD perkapita tidak selalu diikuti oleh meningkatnya derajat desentralisasi fiskal.
 9. Proses faktor non ekonomi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah provinsi di Indonesia dapat dilihat melalui derajat desentralisasi fiskal, dan tax ratio.
 10. Tax ratio memberikan gambaran hubungan antara PAD dan PDRB, dimana apabila PDRB meningkat PAD meningkat maka Tax ratio akan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh iklim perekonomian makro dan mikro, apabila perekonomian makro maupun mikro mengalami pertumbuhan positif atau meningkat maka diharapkan PAD meningkat pula, korupsi menurun, tata kelola berjalan dengan baik, politik sebagai wadah demokrasi bagi pembuat kebijakan berorientasi pada kepentingan publik.
 11. Ketika melakukan pendalaman atas peranan dan kontribusi faktor non ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat jelas terlihat adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat, penerapan e-system dan menemukan jenis-jenis penerimaan lain.
 12. Temuan ini juga sekaligus membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi selain faktor ekonomi yang sering diteliti. Ternyata kesediaan dan tingkah laku masyarakat/badan usaha dalam membayar pajak, seperti faktor non ekonomi, demokrasi, menyelesaikan kegagalan koordinasi, pembangunan koalisi politik, komitmen dan akuntabilitas yang saling bertentangan dan tata kelola desentralisasi dalam mengejar tujuan pembangunan juga mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

6.2 Saran

Agar kesimpulan dan temuan ini dapat diaplikasikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah provinsi di Indonesia dalam penyusunan kebijakan diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Usaha peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, faktor demokrasi, politik, korupsi dan tata kelola pemerintahan harus lebih diperhatikan karena faktor non ekonomi juga dapat menentukan besarnya penerimaan daerah.

2. Inovasi tata kelola pemerintahan terutama dalam pengelolaan penerimaan PAD provinsi di Indonesia harus ditingkatkan sehingga terjadinya kasus korupsi dapat dikurangi.
3. Pemerintah provinsi di Indonesia harus meningkatkan dan menemukan jenis-jenis penerimaan baru dalam hal peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah menggunakan metode ilmiah dan dengan mengikuti prosedur penelitian, namun keterbatasan masih terasa di beberapa hal:

13. Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain demokrasi, politik, korupsi dan tata kelola pemerintahan, seperti faktor sosial masyarakat.
14. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data jumlah kasus korupsi yang sudah incracht dari pengadilan sehingga belum menunjukkan keadaan kasus korupsi yang sesungguhnya.

